

Peduli PMK, Baznas Santuni Warga Ternaknya Mati



KR-Dedy EW

Pemberian santunan dari Baznas.

WONOSARI (KR) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gunungkidul memberikan santunan kepada warga yang sapihnya mati karena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Setiap kepala keluarga yang sapihnya mati diberi santunan Rp1 juta. Penyerahan santunan dimulai sejak beberapa waktu lalu.

"Baznas memiliki tang-

gung jawab memberikan zakat dan santunan bagi warga miskin atau korban musibah. PMK yang mengakibatkan sapi peternak mati masuk kategori warga yang terkena musibah," kata Perwakilan Baznas Gunungkidul Nur Kholidin, Kamis (9/1).

Diungkapkan, santunannya sebesar Rp1 juta untuk setiap keluarga yang sa-

pinya mati terjangkit PMK. Saat penyerahan perdana terdapat data 42 calon penerima. Secara bertahap, uang santunan akan diberikan kepada 42 data warga sapihnya mati akibat PMK. "Untuk wilayah Pampang saja ada 14 keluarga yang mendapatkan santunan. Nanti data akan kami perbarui," ujarnya.

Pihaknya tak menampik jumlah uang yang diberikan jauh lebih rendah dari kerugian yang dialami peternak. Sekalipun begitu, dia berharap uang yang diserahkan dapat sedikit mengurangi beban warga yang sapihnya mati. "Harapannya santunan ini bisa mengurangi beban warga yang sapihnya mati akibat kasus PMK di Gunungkidul," jelasnya. (Ded)

JAMINAN KEAMANAN KONSUMEN Unit Transfusi Darah PMI Terakreditasi Paripurna

WONOSARI (KR) - Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunungkidul menerima sertifikasi paripurna setelah sebelumnya dilakukan visitasi dari tim asesor dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Akreditasi ini sebagai pengakuan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan. Belum seluruh PMI di Indonesia mendapatkan predikat paripurna.

"Alhamdulillah UTD PMI Gunungkidul sudah mendapatkan predikat sempurna dalam pelayanan dan jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan," kata Ketua PMI Kabupaten Gunungkidul Drs H Iswando-



KR-Endar Widodo

Asesor akreditasi bersama pengurus dan karyawan PMI Gunungkidul.

yo MM didampingi sekretarisnya CB Supriyanto SIP, Rabu (8/1).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, khususnya bidang kesehatan unit transfusi darah atau unit donor darah Palang Merah Indonesia merupakan layanan kesehatan dan wajib mengikuti akreditasi yang dilakukan oleh lembaga yang sudah

ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

Palang Merah Indonesia kabupaten Gunungkidul khususnya unit donor darah juga telah diakreditasi oleh lembaga yang berkompeten yaitu lembaga akreditasi fasilitas kesehatan yang melaksanakan akreditasi dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2024. (Ewi)

BENCANA HIDROMETEOROLOGI

1 Rumah Roboh, 2 Tertimbun Longsor, 1 KK Mengungsi

WONOSARI (KR) - Hujan deras disertai angin kencang di Gunungkidul menimbulkan bencana rumah roboh di Kapanewon Patuk dan Longsor di Kalurahan Sawahan, Ponjong, Gunungkidul. Satu rumah milik Yuswan Afendi (44) warga Krakalan, Beji, Patuk dilaporkan roboh rata dengan tanah.

Sementara di Kalurahan Sawahan, Ponjong terdapat 2 rumah tertimbun longsor dan 1 KK diantaranya pemilik rumah terpaksa diungsikan. "Kondisi rumah rusak parah dan satu keluarga diungsikan karena rumahnya tidak dapat dihuni," kata Lurah Sawahan, Ponjong Suwanto Kamis (9/1).

Sementara bencana hidrometeorologi yang disebabkan karena cuaca ekstrem juga menyebabkan rumah huni milik Yusman Efendi warga Brji, Patuk ambruk. Beruntung kejadi-

an tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Saat hujan deras disertai angin kencang pemilik rumah mengsmankan diri dan menjauhi rumah. Akibat kejadian ini pemilik rumah menderita kerugian mencapai puluhan juta rupiah. "Rumah yang roboh ini terbuat dari kayu dan sudah dihuni puluhan tahun," ujar M Ali Syafrudin petugas asesmen Tagana Gunungkidul.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul Purwono keti-



KR-Bambang Purwanto

Rumah milik Yuswan Efendi warga Patuk yang roboh diterjang angin.

ka dihubungi membenarkan kejadian tersebut. Terkait dengan kejadian itu pihaknya telah mengugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penanganan lokasi. Termasuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian.

Kepada warga terutama yang bermukim di wilayah rawan bencana agar meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi tingginya

curah hujan yang berpotensi menimbulkan bencana alam longsor, banjir maupun angin kencang dan petir. "Kami minta warga meningkatkan kewaspadaan," ujarnya.

Informasi di lokasi kejadian menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB beberapa wilayah Gunungkidul diguyur hujan deras disertai angin kencang. (Bmp)

PENUTUPAN PASAR HEWAN

Tunggu Kajian Dinas Peternakan dan Keswan

WONOSARI (KR) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta SIP mengatakan sampai sekarang pemerintah belum mengambil kesimpulan untuk melakukan penutupan pasar hewan. Pemkab Gunungkidul masih menunggu kajian dari organisasi perangkat daerah OPD dalam ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dipeterkeswan).

Tetapi secara maksimal terus dilakukan upaya pencegahan penularan bagi sapi sehat, pengobatan untuk yang sakit dan pen-



KR-Endar Widodo

Meski pasaran, los-los tempat pemajangan sapi lengang.

guburan untuk ternak mati. "Untuk penanganan PMK imengusulkan anggaran ke daerah maupun pusat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung-

kidul Sri Suhartanta SIP MSi, Kamis (9/1).

Sekda belum dapat menyampaikan besaran usulan anggaran, nilainya masih dihitung oleh Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dispeterkeswan juga mengusulkan vaksinasi melalui anggaran biaya tidak terduga (BTT) APBD Kabupaten.

Sementara rencana peraturan bupati (raperbup) ganti rugi tenak yang mati sekarang sedang dilakukan harmonisasi di Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Setelah ada harmonisasi baru dibuat perbupnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dipeterkeswan) Kabupaten Gunungkidul Wibawanti Wulandari SP. (Ewi)

DUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS

BRI Fasilitasi Pembiayaan Jalan Trans Papua

JAKARTA (KR) - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. Melalui keterlibatannya dalam pembiayaan sindikasi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan, BRI berkontribusi dalam menyediakan solusi pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Proyek ini memiliki total nilai investasi sebesar Rp 3,3 triliun dengan masa konsesi selama 15 tahun, yang mencakup dua tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan. Pembangunan jalan sepanjang 50,14 kilometer ini ditujukan untuk menjadi jalur utama transportasi logistik yang menghubungkan Jayapura dan Wamena. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar arus distribusi barang, serta mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Proyek ini akan diimplementasikan oleh PT Utama Mambelim Trans Papua (PT HMTP), yang dibentuk melalui konsorsium antara PT Utama Karya (Persero) dan PT Utama Karya Infrastruktur. Proyek menggunakan skema *Availability Payment* (AP), di mana pemerintah memberikan pembayaran periodik berdasarkan kualitas layanan yang telah disepakati. Skema ini didukung oleh jaminan pembayaran dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Acara Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk proyek ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024 lalu di Gedung Utama Karya, Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief Dienapitra serta Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono yang mewakili Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berorientasi pada peningkatan konektivitas dan



KR-Istimewa

Direktur Wholesale & Institution Business BRI, Agus Noorsanto (kanan) dalam acara penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi untuk proyek KPBU Trans Papua di Gedung Utama Karya, Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024.

kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

PT HMTP resmi menandatangani Perjanjian Pembiayaan

an Sindikasi untuk Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Trans Papua. Dalam pembiayaan ini,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) bertindak sebagai Coordinating Banks, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berperan sebagai bagian dari *Joint Mandate Lead Arrangers and Bookrunners* (JMLABs).

Struktur pembiayaan sindikasi ini melibatkan lima institusi keuangan, yaitu BRI, SMI, BNI, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dan Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua). Total nilai sindikasi mencapai Rp 2,6 triliun, yang terdiri dari pembiayaan dengan skema konvensional senilai Rp 2,36 triliun dan pembiayaan dengan skema syariah sebesar Rp 300 miliar.

Direktur Wholesale & Institution Business BRI Agus Noorsanto menyatakan bahwa keterlibatan BRI dalam proyek ini merupakan bukti nyata kontribusi perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional. "Mi-

nat tinggi lembaga keuangan terhadap pembiayaan proyek ini tercermin dari tingkat *oversubscription* sebesar 1,27 kali, yang menunjukkan kepercayaan besar institusi keuangan terhadap prospek proyek KPBU Trans Papua. Sebagai salah satu *Coordinating Banks*, BRI berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara Badan Usaha Pelaksana (BUP), lembaga keuangan, PII, dan Pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk mendukung keberhasilan proyek strategis lainnya melalui skema KPBU di masa mendatang," ujarnya.

Keterlibatan BRI dalam pembiayaan sindikasi ini menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi dalam pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. (*)



KR-Istimewa

BRI berkontribusi dalam menyediakan solusi pembiayaan yang terstruktur dan berkelanjutan sebagai bentuk mendukung pembangunan Jalan Trans Papua.